



PNS Kota Gemar Nongkrong

Wawali Minta Kepala SKPD Tegas

YOGYAKARTA (SINDO)– Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta Haryadi Suyuti menginstruksikan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memperketat pengawasan terhadap anak buahnya.

Langkah ini dilakukan menyusul ada laporan yang menyebutkan, banyak pegawai yang mangkir saat jam kerja.

Haryadi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mengenal istilah jam istirahat bagi pegawai. Sesuai peraturan daerah (perda), kata dia, jam kerja pegawai di lingkungan pemkot sebanyak 37,5 jam. Sejak Senin hingga Jumat, pegawai masuk kerja pukul 07.30–14.30 WIB. Jumat, mereka kerja pukul 07.30–11.30 WIB. Sabtu, mereka kerja pukul 07.30–13.00 WIB.

"Jadi, tidak dibenarkan me-

reka mangkir dengan alasan makan di kantin sambil baca koran," katanya kepada wartawan kemarin.

Setiap pagi dan siang ratusan pegawai diketahui selalu memadati kantin balai kota. Beberapa di antaranya bahkan betah duduk berjam-jam sembari minum kopi dan baca koran. Mereka biasa datang secara berkelompok. Kondisi ini cukup ironis mengingat pemerintah pusat telah menjanjikan kenaikan gaji mereka untuk peningkatan kinerja.

Menurut Haryadi, tidak diberinya jam istirahat bagi pegawai bukan berarti mereka dilarang makan dan minum. Pegawai tetap diperbolehkan makan siang, tapi tetap berada di dalam ruangan. Terkecuali dalam keadaan mendesak atau ada tugas keluar. "Kantin kan telah disediakan telepon. Tidak perlu lah ke sana. Kan cukup tele-

pon saja bisa," katanya. Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Yogyakarta Maryoto mengutarakan, pihaknya telah mengambil berbagai upaya untuk mendisiplinkan pegawai. Salah satunya menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa tempat yang ditengarai sebagai

tempat mangkir pegawai negeri sipil (PNS) di antaranya di mal, pertokoan, dan warung-warung makan.

"Sudah dua kali di tahun ini, tapi hasilnya memang tidak banyak. Sebagian besar justru pegawai provinsi (DIY). Kami tidak punya hak untuk menindak

pegawai provinsi. Wilayah kami pemkot saja," katanya.

Soal banyaknya PNS yang nongkrong di kantin saat jam kerja, dia menyerahkan itu sepenuhnya kepada para Kepala SKPD sebab mereka lebih berhak dan memiliki fungsi pengawasan melekat. "Tidak harus Bawasda. Kami berharap SKPD bisa menjalankan fungsinya dan mengambil sikap tegas terhadap mereka," terangnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Arif Noor Hartanto prihatin dengan kondisi ini. Dia pun mengaku kerap mendapati para pegawai yang mangkir jam kerja. Sebagian besar pegawai itu berada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kondisi ini, kata dia, seharusnya tidak terjadi jika setiap PNS menyadari bahwa anggaran pegawai baik di tingkat pusat maupun daerah sangat tinggi.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 19 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005